

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian, Sutedi .*Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* . Jakarta : Sinar Grafika , 2007.

----- .*Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: SinarGrafika, 2009.

Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara,1996.

Boedi, Harsono, *Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-pokok Kebijakan Pertanahan* . Jakarta :Universitas Indonesia, 2004.

Diklat Pengelolaan Asset Daerah oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2015.

Hasni . *Hukum Penataan Ruang Dan Penata Gunaan Tanah* . Jakarta : Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Holoan, Sitorus dan Dayat Limbong .*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* Yogyakarta :Mitra Kebijakan Tanah Indonesia , 2004 .

----- ,*Perbandingan Hukum Tanah*. Yogyakarta :Mitra Kebijakan Tanah , 2004.

Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2011.

Philipus, M.Hadjon.*Pengantar Hukum Administrasi Negara*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2005.

Samsul, Hidayat. *Optimalisasi pengelolaan manajemen asset daerah*. Diklat provinsi NTB, hlm 2.

Soedaryo, Solmin. *Status Hak dan Pengadaan Tanah* .Jakarta :Sinar Grafika , 1993.

Soejono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* .Jakarta :Universitas Indonesia , 2008.

Soemitro dalam Soejono dan Abdurrahman .*Metode Penelitian Hukum* .Jakarta :PT.Rineka Citra , 2003.

Supriadi. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika,2012.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika , 2013.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (UUPA).

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/K/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-352-2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45.207-2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

C. Internet

www.RRI.co.id. Edisi 12 Mei 2015 .

www.sumbar.antara.news

www.skyscrapercity.com ----- Project and development kota Bukittinggi hlm 47.

Repository.Universitas Sumatera Utara.ac.id tanggal 24 januari 2015, 09.30 WIB

www.bukittinggikota.co.id diakses pada tanggal 01 maret 2016 ,pukul 10.45 WIB.

<http://www.bukittinggikota.go.id/post/read/154/letak-geografis-dan-topografi> diakses pada tanggal 01 maret 2016 pukul 10.56 WIB.

